

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu hal penting dalam kemajuan negara merupakan pembangun ekonomi. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses pembangunan yang terjadi secara berkelanjutan dan dinamis.<sup>1</sup> Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi yaitu Struktur Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Indeks Pertumbuhan Manusia, Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Urbanisasi, Indeks Kualitas Hidup, Angka Tabungan, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran dan Kriminalitas. Pengangguran merupakan salah satu indikator yang terjadi karena meningkatnya angkatan kerja yang tidak disertai lapangan pekerjaan yang memadai.<sup>2</sup> Pengangguran menjadi masalah ekonomi yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia dengan tingkat pengangguran yang tinggi dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah tetapi tidak disertai dengan lapangan pekerjaan yang cukup.

Pengangguran merupakan indikator yang penting dalam mengukur kemajuan negara.<sup>3</sup> Pengangguran merupakan sebutan yang digunakan untuk Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.<sup>4</sup> Tingkat pengangguran berupa angka dapat dilihat dari besarnya tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan dan sedang membangun usaha, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja. Pencatatan data pengangguran terbuka diukur menggunakan

---

<sup>1</sup> Haikal Ghifary et al., "Studi Literatur Keterkaitan Pembangunan Ekonomi Dengan Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 4409–14.

<sup>2</sup> Cut Badratun Navis, *Pengaruh Dana Desa Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh* (Banda Aceh, Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2019), <https://respository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14465>.

<sup>3</sup> Sri Yuni Bintang dan Riandani Rezki Prana, "Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Medan," *Jurnal Studi Manajemen* 2, no. 2 (2020): 97–100.

<sup>4</sup> Yosef Hartoko, "Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan Dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 3 (2019): 201–7.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), TPT merupakan perhitungan presentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.<sup>5</sup>

Tingkat pengangguran yang tinggi bagi negara berkembang seperti Indonesia telah menjadi masalah yang serius karena menimbulkan lebih banyak dampak salah satunya masalah kemiskinan. Oleh karena itu pengangguran menjadi hal urgensi yang harus segera ditindak lanjuti. Karena jumlah pengangguran di Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (persen)
2018	5,34
2019	5,28
2020	7,07
2021	6,49
2022	5,86

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 1.1 menunjukkan tahun 2019 tingkat pengangguran di Indonesia berhasil turun 0,06% dari tahun 2018. Tahun 2020 tingkat pengangguran langsung naik ke angka 7,07%. Peningkatan yang terjadi di tahun 2020 diakibatkan dua hal. Pertama, virus corona yang masuk ke Indonesia. Kedua, krisis ekonomi dunia. Indonesia berhasil menghadapi situasi pandemi dan krisis, dengan membuktikan bahwa Indonesia dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2021 dan 2022.<sup>6</sup> Tiga tahun terakhir Indonesia mampu untuk mengatasi masalah pengangguran walaupun hanya sedikit. Banyaknya hal yang terjadi tiga tahun belakangan ini yang mengakibatkan perekonomian Indonesia goyah seperti krisis ekonomi dan munculnya virus Corona. Virus Corona telah menyebar diseluruh negara terutama juga di Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia merasakan dampak dari adanya virus Corona dan krisis ekonomi salah satunya provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah (persen)
2018	4,47
2019	4,44

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Konsep Tenaga Kerja* (Pati, Jawa Tengah, 2022), <https://patikab.bps.go.id>.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* (Jakarta, Indonesia, 2022), <https://www.bps.go.id>.

<b>2020</b>	6,48
<b>2021</b>	5,95
<b>2022</b>	5,57

*Sumber: Data Diolah 2022*

Tabel 1.2 menunjukkan pergerakan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah lima tahun terakhir berfluktuatif. Jumlah tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Tengah yaitu tahun 2020.<sup>7</sup> Tingginya tingkat pengangguran Jawa Tengah tahun 2020 disebabkan oleh munculnya virus corona di Indonesia dan krisis ekonomi. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang juga terdampak pandemi dan krisis ekonomi adalah Kabupaten Pati.

**Tabel 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pati**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pati (persen)</b>
<b>2018</b>	3,57
<b>2019</b>	3,64
<b>2020</b>	4,74
<b>2021</b>	4,60
<b>2022</b>	4,45

*Sumber: Data diolah 2022*

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka kabupaten Pati lima tahun mengalami kondisi fluktuatif. Tahun 2019 dan 2020 pengangguran di Kabupaten Pati meningkat. Disebabkan merebaknya wabah Corona virus (Covid-19) dan krisis ekonomi.<sup>8</sup> Tingkat pengangguran yang meningkat dua tahun sebelumnya dapat diatasi oleh pemerintah kabupaten Pati pada tahun 2021 dan 2022. Dimana tingkat pengangguran terbuka turun sebesar 0,14% - 0,15%.<sup>9</sup> Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Indonesia dan Jawa Tengah, tingkat pengangguran kabupaten Pati ada dibawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Pati selama lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang baik.

Tingginya tingkat pengangguran suatu daerah biasanya diakibatkan oleh banyaknya jumlah dari penduduk. Jumlah banyak ini akan menimbulkan masalah bagi perekonomian suatu negara.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi, *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)* (Semarang, Jawa Tengah, 2022), <https://jateng.bps.go.id>.

<sup>8</sup> Eri Hariyanto and Widyaswara, *Pengangguran Dan Krisis Ekonomi* (Jakarta, Indonesia, 2020), <https://klc2.kemenkeu.go.id>.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi, *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)* (Semarang, Jawa Tengah, 2022), <https://jateng.bps.go.id>.

Masalah pengangguran tidak mudah dan cepat untuk diatasi. Hal seperti ini dapat diamati dari banyaknya usaha yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, namun masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang minim mengakibatkan adanya pengangguran. Oleh karena itu tingginya tingkat pengangguran harus direspons melalui pembuatan lapangan pekerjaan, agar menyerap pekerja yang ada tanpa harus melihat dari perusahaan. Upaya menciptakan lapangan pekerjaan sudah sedikit mengurangi tingkat pengangguran, tetapi tidak serta merta menuntaskan pengangguran yang ada di Indonesia.<sup>10</sup> Selain pengangguran hal yang perlu diketahui yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil dari pendapatan yang bersumber dari retribusi, pajak, pengelolaan kekayaan dan pendapatan sah lainnya, dengan tujuan untuk membangun perekonomian daerah dengan menggali pendanaan atau sumber daya yang berasal dari dalam daerah.<sup>11</sup> Pajak, retribusi, penghasilan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah kabupaten Pati dengan adanya PAD harus melaksanakan fungsinya untuk menyalurkan atau memanfaatkan hasil dana dari pajak, retribusi, penghasilan dan pendapatan daerah secara efektif dan baik.<sup>12</sup>

Wewenang pengelolaan Pendapat Asli Daerah (PAD) menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi melalui pendapatan asli daerah berdampak kepada tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran yang menurun menjadi salah satu hal positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemerintah berkewajiban mengelola

---

<sup>10</sup> Enike Fina Polla, Een N Walewangko, and Steeva Y. L Tumangkeng, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009-2019," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21, no. 2 (2021): 180–90.

<sup>11</sup> Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2011).

<sup>12</sup> Agus Sunarya Sulaeman and Vivin Silvia, "Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 97–112.

pendapatan asli daerah dengan baik agar masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi tersebut.<sup>13</sup>

**Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati (Milyar)</b>
<b>2018</b>	384.04
<b>2019</b>	363.99
<b>2020</b>	371.70
<b>2021</b>	388.64
<b>2022</b>	388.75

*Sumber: Data Diolah 2022*

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pati dari tahun 2018-2022. Jika dilihat jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 lebih besar dari dua tahun kedepannya. Dimana pergerakan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022 naik turun.<sup>14</sup> Pendapatan asli daerah yang jumlahnya banyak dapat dimanfaatkan oleh kabupaten Pati untuk membiayai pembangunan daerah dan pengeluaran pemerintah daerah.<sup>15</sup> Sumber pembiayaan pembangunan daerah selain PAD adalah Dana Desa.

Dana Desa menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Dana yang diperoleh dari APBN disalurkan pemerintah desa melalui transfer ke APBD kabupaten atau kota, yang selanjutnya ditransfer ke APBDesa, dana ini disebut Dana Desa. Dana Desa pertama kali diberikan pada tahun 2015 oleh pemerintah Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.<sup>16</sup> Dimana dana tersebut dipergunakan dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berupa Pembangunan, pelaksanaan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa yang digunakan membangun dan memperkuat kemampuan daerah dari sisi

---

<sup>13</sup> Afrianti Elyse Vanomy, "Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Melalui Belanja Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Dewantara* 2, no. 1 (2019): 63–67.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Penerimaan* (Semarang, Jawa Tengah, 2022), <https://jateng.bps.go.id>.

<sup>15</sup> Neneng Hastuti Hidayat et al., "Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Gorontalo," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 342–60.

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2014* (Jakarta, Indonesia, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id>.

ekonomi. Pemberian dana ini merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah mengembangkan desa dan masyarakatnya, dengan dukungan melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas desa baik fisik atau non fisik. Dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>17</sup>

**Tabel 1.5 Dana Desa Kabupaten Pati**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Desa Kabupaten Pati (Milyar)</b>
<b>2018</b>	365.45
<b>2019</b>	417.03
<b>2020</b>	426.38
<b>2021</b>	426.38
<b>2022</b>	427.09

*Sumber: Data diolah 2022*

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pergerakan dana desa naik turun lalu naik lagi. Setiap tahun pemerintah Indonesia memberikan dana desa yang semakin bertambah, walaupun tahun 2021 dana desa yang diberikan sama dengan tahun 2020.<sup>18</sup> Dana Desa yang setiap tahun bertambah dapat digunakan untuk membangun ekonomi daerah. Pengelolaan dana desa yang baik dapat melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas desa, memperkuat Masyarakat, meningkatkan ekonomi, dan mengatasi kesenjangan desa dengan menggunakan pembangunan.<sup>19</sup> Pemberian dana desa dari pemerintah diharapkan desa mampu mengelola dengan baik, dengan pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan.<sup>20</sup> Selain dana desa sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari alokasi dana desa.

Alokasi dana desa merupakan salah satu hal penting dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Dana desa dan alokasi dana desa memiliki perbedaan sumber dana, dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD. Pemerintah kabupaten berkewajiban menyalurkan alokasi dana desa, alokasi dana berasal dari dana perimbangan yang sudah dikurangi 20% Dana Alokasi

<sup>17</sup> Hasnop Putra Minang, Kumba Digdowiseiso, and Eko Sugiyanto, "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman" 42, no. 1 (2021): 68–87.

<sup>18</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dana Desa Di Kabupaten Pati* (Pati, Jawa Tengah, 2022), <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

<sup>19</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2014 (Jakarta, Indonesia, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>20</sup> Lukman Adi Santoso et al., *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kedua (Jakarta Pusat, Indonesia, 2019).

Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selanjutnya disalurkan ke desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).<sup>21</sup> “Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada desa, bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.”<sup>22</sup>

**Tabel 1.6 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pati**

Tahun	Alokasi Dana Desa Kabupaten Pati (Milyar)
2018	136,14
2019	142,15
2020	142,15
2021	129,43
2022	134,98

Sumber: Data diolah 2022

Tabel 1.6 menunjukkan jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun 2018-2022.<sup>23</sup> Menurut peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Pasal 81 telah diatur mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan tersebut mengatur tentang Siltap yang ditunjang menggunakan Alokasi Dana Desa.<sup>24</sup> Dalam pemanfaatan Dana Desa, 30% ditujukan untuk mendukung biaya operasional desa, sementara 70% dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>25</sup> Tujuan dari diberikannya ADD untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa menjadi lebih baik setiap tahunnya.

Al-Qur'an surah Al-Hasry ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>21</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Perbedaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa* (Jakarta, Indonesia, 2022), <https://djpk.kemenkeu.go.id>.

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005* (Jakarta, Indonesia, 2005), <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>23</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Pati* (Pati, Jawa Tengah, 2022), <https://opendata.patikab.go.id>.

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019* (Jakarta, Indonesia, 2019), <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>25</sup> Juliska Baura, Jantje Mandey, and Femmy Tulusan, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat),” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (2015): 1–9.

Surah Al-Hasry ayat 7 menjelaskan pada masa Rasulullah dana daerah yang diperoleh disalurkan secara adil dan merata untuk menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal, Artinya dana yang diperoleh pemerintah daerah baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa atau Alokasi Dana Desa harus disalurkan untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus bisa dirasakan semua masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin.<sup>26</sup>

Karnila A serta Nur W. N (2021) melakukan studi untuk meneliti “dampak pertumbuhan ekonomi, alokasi dana umum dan khusus, serta pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran”. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari badan pemerintah Kota Metro. Mereka menggunakan data seperti angka dari pertumbuhan ekonomi, laporan keuangan serta statistik pengangguran dari 2013 hingga 2018. Hasilnya mereka menunjukkan bahwa alokasi dana umum dan khusus, serta pendapatan asli daerah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Metro.<sup>27</sup>

Yani R, dkk (2021) melakukan penelitian untuk “menganalisis dampak alokasi dana umum dan khusus, pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran”. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki dampak positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya tidak signifikan. Dana alokasi khusus berdampak negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dana alokasi khusus memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, tetapi alokasi dana khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan* (Semarang, Jawa Tengah: PT. Karya Toha Putra, 2021).

<sup>27</sup> Karnila Ali and Nur Wahyu Ningsih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran,” *Jurnal Manajemen* 15, no. 1 (2021): 85–101.

<sup>28</sup> Yani Rizal, Iskandar, and Devra Wati Ritonga, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 5, no. 1 (2021): 56–67.

Theresia Oktavia (2019) melakukan penelitian mengenai “pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi Kalimantan Barat”. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, dan partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Barat. Peneliti menyatakan hal ini terjadi diakibatkan karena pemberian dana desa yang berbeda di setiap desa, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dana dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan partisipasi angkatan kerja yang ada di Kalimantan Barat.<sup>29</sup>

Jeremi E. F, dkk (2022) melakukan studi tentang “dampak Pendapatan Asli Daerah, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non-sarbagita Provinsi Bali”. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang mencakup data *cross section* serta data *time series*. Hasil penelitian menunjukkan variabel upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan asli daerah berpengaruh pada tingkat pengangguran di kawasan Non-Sarbagita provinsi Bali berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.<sup>30</sup>

Suryanta (2019) melakukan penelitian tentang “dampak kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan di kota Depok”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan Suryanto menjelaskan bahwa pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Depok sendiri masih perlu dikembangkan lagi. Karena memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi dan

---

<sup>29</sup> Theresia Oktavia, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan* 8, no. 5 (2019), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/34046>.

<sup>30</sup> Jeremi Erick Fandy Yeimo and Anak Agung Ketut Ayuningsasi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Regional Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kawasan Non-Sarbagita Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 11, no. 11 (2022): 1306–14.

pengangguran pengelolaan keuangan daerah tersebut berpengaruh signifikan.<sup>31</sup>

Kesengangan dalam penelitian ini terletak pada ketidakkonsistenan hasil dari lima penelitian berkaitan dengan konteks pengangguran dan hasil dari penelitian yang tidak sesuai dengan fenomena dilapangan, maka diperlu penelitian agar diketahui hasil lainnya. *Novelty* (kebaharuan) dari penelitian ini ada pada konsep variable independen dan objek penelitian, penulis dalam penelitian ini mengembangkan variable Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini. Penggunaan objek penelitian ini pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena tidak banyak penelitian yang membahas mengenai pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Pengangguran, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pati Tahun 2015-2022".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan dan dijabarkan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Pati tahun 2015-2022?
2. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Pati 2015-2022?
3. Apakah Alokasi Dana Desa Berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Pati 2015-2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas. Berikut ini tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran di Kabupaten Pati dari tahun 2015-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Pengangguran di Kabupaten Pati dari tahun 2015-2022.

---

<sup>31</sup> Suryanta, "Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Depok," *Management Business Journal* 2, no. 2 (2019): 372–89.

3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pengangguran di Kabupaten Pati dari tahun 2015-2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada penjelasan dan penjabaran diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, seperti pendapatan asli daerah, dana desa dan alokasi dana desa.
2. Penelitian ini bisa dijadikan tambahan dalam kajian pustaka yang akan dilakukan peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran.
3. Penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengangguran. Dan diharapkan pemerintah kabupaten dapat menanggulangi tingkat pengangguran di daerahnya masing-masing.
4. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten Pati dalam penanganan tingkat pengangguran. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pengangguran.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Sebelum masuk ke bab pertama terlebih dahulu ada halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, moto, lembar persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, dan daftar isi.

##### **BAB PERTAMA (PENDAHULUAN)**

Pada bab ini berisi beberapa sub bab yaitu: “latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika dari penulisan”

##### **BAB KEDUA (LANDASAN TEORI)**

Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu: “deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis.”

##### **BAB KETIGA (METODE PENELITIAN)**

Pada bab metode penelitian ini berisi metode yang dilakukan dalam penelitian yaitu: “jenis dan pendekatan, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variable operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.”

**BAB KEEMPAT (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN)**

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasannya seperti: “hasil penelitian yang didalamnya ada gambaran objek dan analisis data, serta pembahasan.”

**BAB KELIMA (PENUTUP)**

Pada bab penutup berisi mengenai kesimpulan serta saran. Setelah bab kelima ada bagian akhir yang berisi daftar Pustaka serta lampiran.

